

ABSTRAK

Mabrohul 'Alim : *Konsep Demokrasi dan Kedudukannya Dalam Wilayah Al-Faqih*

Hubungan Islam dan demokrasi dikalangan para pemikir muslim, maka akan ditemukan begitu banyak kontroversi dan silang pendapat. Sebagian beranggapan bahwa Islam dan demokrasi tidak memiliki kaitan sama sekali, Islam tidak mengenal kata demokrasi, karena dalam demokrasi kedaulatan ditangan rakyat dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kedaulatan tertinggi ada ditangan Allah. Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa demokrasi adalah bagian dari Islam, karena demokrasi sejalan dengan ajaran Islam, Salah satunya adalah Ayatullah Khomaeini yang memadukan antara Islam dan demokrasi dalam Konsep *wilayah al-faqih*.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pandangan Ayatullah Khomaeini tentang demokrasi, 2) Apa latar belakang lahirnya konsep *wilayah al-faqih* Ayatullah Khomaeini, 3) Bagaimana kedudukan konsep demokrasi dalam *wilayah al-faqih*.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pandangan Ayatullah Khomaeini tentang demokrasi, 2) untuk mengetahui latar belakang lahirnya konsep *wilayah al-faqih* Ayatullah Khomaeini, 3) untuk mengetahui kedudukan konsep demokrasi dalam *wilayah al-faqih*.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa demokrasi dan Islam, dalam hal ini *wilayah al-faqih* adalah dua hal yang berbeda, yang mempunyai perbedaan signifikan untuk mendapatkan pemaknaan yang utuh haruslah dilihat baik dari kelahiran serta perkembangannya masing-masing dalam sejarahnya,

Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*) buku-buku karya Ayatullah Khomaeini. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dilakukan interpretasi data dalam upaya untuk memecahkan dan menjawab masalah yang diajukan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa konsep demokrasi dalam pandangan Ayatullah Khomaeini bukanlah demokrasi yang dipahami oleh Barat bahwa kedaulatan ditangan rakyat sepenuhnya, melainkan kedaulatan tetap ditangan Tuhan, Ayatullah Khomaeini sangat menjunjung suara mayoritas rakyat yang harus diperhatikan oleh seorang *faqih*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan Ayatullah Khomaeini tentang demokrasi diartikan sebagai hak politik masyarakat, bukan kedaulatan mutlak. baginya hak masyarakat harus dijaga dalam bingkai pemerintahan Islam dengan memposisikan seorang *faqih* sebagai perwujudan dari kedaulatan Tuhan, sehingga terbentuklah lembaga *wilayah al-faqih*. Disini tampak jelas kesamaan antara konsep demokrasi dan *wilayah al-faqih* yang sama-sama mengakui hak politik masyarakat.